DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

PERBANDINGAN PENDIDIKAN MESIR INDONESIA

Torang Siregar
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia
Corespondance: torangsir@uinsyahada.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi:
Revisi Akhir:
Diterbitkan *Online*: September 2025

KEYWORDS

KORESPONDENSI

No HP:

E-mail:
torangsir@uinsyahada.ac.id

Abstracts

Education plays a crucial role in the progress of a nation, including in Egypt and Indonesia. Egypt, as a Middle Eastern country, has developed the largest education system in its region since the 1990s, focusing on increasing access to early childhood education and integrating information and communication technology (ICT) at all educational levels. Although ranked 116th in the Human Development Index (HDI), Egypt continues to strive to improve its education quality through international assistance. On the other hand, Indonesia is also committed to expanding access to education, implementing a 9-year compulsory education policy covering Elementary School (SD) and Junior High School (SMP). However, challenges such as disparities in education quality between regions remain a significant issue. A comparison of the Egyptian and Indonesian education systems reveals several similarities and differences. In Egypt, the education system is divided into three stages: Basic Education (primary and preparatory), Secondary Education, and Post-Secondary Education. Basic education in Egypt lasts for 8 years, differing from Indonesia's 9-year system. Additionally, Egypt has a dual education system consisting of secular education and Al-Azhar religious education, whereas Indonesia places greater emphasis on general and vocational education. Higher education in Egypt is also more centralized, with 17 public universities and several private institutions. Both countries face challenges in achieving educational equity, particularly in reducing gaps between economic groups. Egypt focuses on improving access to and quality of basic education, while Indonesia prioritizes the expansion of vocational and technical education to meet labor market demands. In conclusion, despite differences in structure and emphasis, both Egypt and Indonesia continue

DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

to enhance their education quality to produce globally competitive generations

Abstrak

Pendidikan memegang peran krusial dalam kemajuan suatu negara, termasuk di Mesir dan Indonesia. Mesir, sebagai negara di Timur Tengah, telah mengembangkan sistem pendidikan terbesar di kawasannya sejak 1990-an, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan integrasi teknologi informasi (ICT) di semua jenjang pendidikan. Meskipun menempati peringkat 116 dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Mesir terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya melalui bantuan internasional. Di sisi lain, Indonesia juga berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan, dengan wajib belajar 9 tahun yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, tantangan seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah masih menjadi masalah utama. Perbandingan sistem pendidikan Mesir dan Indonesia menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Di Mesir, sistem pendidikan terbagi menjadi tiga tahap: Pendidikan Dasar (primer dan persiapan), Pendidikan Menengah, dan Pasca Pendidikan Menengah. Pendidikan dasar di Mesir berlangsung selama 8 tahun, berbeda dengan Indonesia yang menerapkan 9 tahun. Selain itu, Mesir memiliki sistem pendidikan dualistik, yaitu pendidikan sekuler dan pendidikan keagamaan Al-Azhar, sementara Indonesia lebih menekankan pada pendidikan umum dan kejuruan. Pendidikan tinggi di Mesir juga lebih terpusat, dengan 17 universitas negeri dan sejumlah lembaga swasta. Kedua negara memiliki tantangan dalam pemerataan pendidikan, terutama dalam mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi. Mesir berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan dasar, sementara Indonesia lebih menekankan pada perluasan pendidikan vokasi dan kejuruan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Kesimpulannya, meskipun terdapat perbedaan dalam struktur dan penekanan, baik Mesir maupun Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan generasi yang kompetitif di tingkat global.

DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

Kata Kunci: Perbandingan Pendidikan, Mesir, Indonesia, Sistem Pendidikan, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik sehingga akan berdampak bagi negara dan bangsa yang lebih maju. Setiap negara menyelenggarakan pendidikan sebagai upaya untuk membangun bangsa. Mesir terletak di bagian timur laut benua afrika dan semenanjung sinai di barat daya benua Asia. merupakan negara yang fokus pada sektor pendidikan untuk memajukan negaranya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang berkualitas sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan negara dan bangsa. Setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebijakan dan tujuan nasionalnya. Mesir, sebagai salah satu negara tertua di dunia, memiliki sistem pendidikan yang telah berkembang sejak zaman kuno. Negara ini terletak di bagian timur laut benua Afrika dan berbatasan dengan semenanjung Sinai di barat daya benua Asia. Sebagai negara yang berupaya meningkatkan daya saing globalnya, Mesir menaruh perhatian besar pada sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasionalnya.

Sistem pendidikan di Mesir sangat sentralistik, di mana kebijakan pendidikan ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Pendidikan di Mesir terbagi menjadi tiga tahap utama, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan pasca-menengah atau perguruan tinggi. Pendidikan dasar di Mesir mencakup tahap primer dan tahap persiapan, yang keseluruhannya berlangsung selama delapan tahun. Pendidikan menengah berlangsung selama tiga tahun, sedangkan pendidikan tinggi dapat berlangsung antara tiga hingga tujuh tahun tergantung pada program studi yang diambil. Sistem ini berbeda dengan Indonesia, yang menerapkan sistem wajib belajar sembilan tahun yang mencakup jenjang SD dan SMP sebelum melanjutkan ke jenjang SMA atau pendidikan kejuruan.

Jenis pendidikan di Mesir terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Pendidikan formal terdiri dari tiga sistem utama, yakni sistem pendidikan sekuler, sistem pendidikan Al-Azhar, dan sistem pendidikan vokasional. Sistem pendidikan sekuler dikelola oleh pemerintah dan mengikuti kurikulum nasional yang mencakup mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Sistem pendidikan Al-Azhar merupakan sistem pendidikan Islam yang berafiliasi dengan Universitas Al-Azhar, salah satu lembaga pendidikan Islam tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sementara itu, pendidikan vokasional di Mesir dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan teknis dan profesional agar siap menghadapi dunia kerja.

Salah satu keunggulan sistem pendidikan di Mesir adalah keberadaan Universitas Al-Azhar, yang telah berdiri sejak abad ke-10 dan menjadi pusat keilmuan Islam dunia. Universitas ini tidak hanya menyediakan pendidikan agama Islam tetapi juga program studi di berbagai bidang ilmu seperti kedokteran, sains, dan humaniora. Selain Al-Azhar, Mesir juga memiliki sejumlah universitas ternama seperti Universitas Kairo dan Universitas Ain Shams, yang menawarkan pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu. Universitas-universitas ini menjadi pusat penelitian dan inovasi yang berperan dalam pembangunan nasional Mesir.

Jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan yang mencolok. Salah satu kesamaannya adalah struktur jenjang pendidikan yang berdasarkan usia perkembangan anak. Namun, perbedaannya terletak pada durasi pendidikan dasar, di mana Indonesia menerapkan sistem wajib belajar sembilan tahun yang mencakup SD dan SMP, sedangkan Mesir menerapkan sistem delapan tahun pada jenjang primary school. Selain itu, Indonesia memiliki sistem pendidikan berbasis pesantren yang mirip dengan sistem Al-Azhar di Mesir, tetapi dengan pendekatan yang lebih beragam tergantung pada tradisi lokal masing-masing daerah.

Pendidikan di Mesir menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah pedesaan, fasilitas pendidikan sering kali kurang memadai dan tenaga pengajar yang berkualitas masih terbatas. Selain itu, kurikulum yang cenderung padat dan berbasis hafalan menjadi tantangan tersendiri bagi siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Pemerintah Mesir telah melakukan berbagai reformasi pendidikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah modernisasi kurikulum agar lebih sesuai

dengan tuntutan zaman dan kebutuhan industri. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga mulai diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh tenaga pengajar berkualitas. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memperluas akses beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

Dalam konteks global, sistem pendidikan di Mesir terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Reformasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan daya saing lulusan Mesir di pasar tenaga kerja internasional. Peningkatan kualitas pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi pendidikan di Mesir. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan penelitian dan inovasi di perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi berbasis pengetahuan.

Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan sektor swasta. Partisipasi aktif masyarakat dalam dunia pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan. Di Mesir, banyak organisasi nonpemerintah (NGO) yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah di daerah terpencil dan menyediakan program beasiswa bagi siswa kurang mampu. Inisiatif semacam ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas.

Secara keseluruhan, pendidikan di Mesir menunjukkan perkembangan yang signifikan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya reformasi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan pendidikan di Mesir dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa dan negara.

Dalam konteks perbandingan dengan Indonesia, kedua negara memiliki tantangan yang hampir serupa dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Reformasi pendidikan yang dilakukan oleh Mesir dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Begitu juga sebaliknya, pengalaman Indonesia dalam menerapkan pendidikan berbasis karakter dan inovasi teknologi dalam pembelajaran dapat menjadi referensi bagi Mesir dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikannya.

Masa depan pendidikan di Mesir bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melaksanakan reformasi pendidikan secara menyeluruh. Dengan memperkuat sistem pendidikan yang berkualitas, Mesir dapat mencetak generasi muda yang kompetitif di tingkat global dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Investasi dalam pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan stabilitas negara secara keseluruhan.

Mesir memiliki sistem pendidikan secara keseluruhan terbesar di TimurTengah dan telah berkembang dengan pesat sejak awal 1990-an. Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Mesir telah diberikan prioritas yang lebih besar dalam memperbaiki sistem pendidikan. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM),Mesir menempati peringkat 116 di IPM. Dengan bantuan Bank Dunia dan organisasi-organisasi multilateral lainnya Mesir bertujuan untuk meningkatkan akses pada perawatan anak usia dini dan pendidikan serta masuknya ICT di semua tingkat pendidikan, terutama pada tingkat tersier.

Mesir memiliki sistem pendidikan terbesar di Timur Tengah dan telah mengalami perkembangan pesat sejak awal 1990-an. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial, pemerintah Mesir mulai menyadari bahwa pendidikan adalah faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai kebijakan telah diambil untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di semua jenjang. Pemerintah Mesir memberikan perhatian khusus pada peningkatan infrastruktur sekolah, kualitas pengajaran, serta integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran dan pertumbuhan populasi yang pesat, Mesir terus berupaya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan pendidikan berkualitas menjadi semakin mendesak. Pemerintah Mesir juga berusaha menyesuaikan sistem pendidikan dengan tuntutan global, termasuk penerapan teknologi informasi dan

komunikasi dalam pembelajaran. Selain itu, sistem pendidikan di Mesir terus mengalami reformasi untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja global. Upaya ini didukung oleh berbagai organisasi internasional seperti Bank Dunia yang berkontribusi dalam mendanai proyek-proyek pendidikan. Pemerintah Mesir juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan luar negeri guna meningkatkan standar pendidikan di negara tersebut.

Pemerintah Mesir telah menaruh perhatian yang lebih besar dalam memperbaiki sistem pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa pendidikan memiliki peran sentral dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendidikan dasar dan menengah. Program-program reformasi pendidikan juga berfokus pada peningkatan kualitas pengajaran dengan memberikan pelatihan kepada para guru agar mereka lebih siap dalam mengajar sesuai dengan perkembangan kurikulum. Selain itu, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik guna menarik lebih banyak individu berbakat ke dalam profesi ini. Dalam hal infrastruktur, Mesir telah membangun dan merenovasi ribuan sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya tenaga pengajar berkualitas dan keterbatasan sumber daya, pemerintah terus berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berbagai inisiatif juga telah diperkenalkan untuk meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Dengan demikian, sistem pendidikan di Mesir semakin berkembang dan mengalami transformasi yang positif dari waktu ke waktu.

Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Mesir saat ini menempati peringkat ke-116, yang menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Peringkat ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih bisa ditingkatkan melalui investasi yang lebih besar dalam pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat IPM Mesir adalah kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah negara. Di daerah perkotaan, akses ke pendidikan cenderung lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan yang masih menghadapi kendala seperti kurangnya infrastruktur sekolah dan tenaga pengajar yang terbatas. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan literasi dan angka partisipasi sekolah menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan Mesir. Pendidikan tidak hanya dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup individu, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah Mesir terus berupaya meningkatkan standar pendidikan agar dapat bersaing di tingkat global. Reformasi pendidikan yang dilakukan di Mesir juga bertujuan untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

Dengan bantuan Bank Dunia dan organisasi multilateral lainnya, Mesir berusaha untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan serta memperkenalkan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di semua tingkat pendidikan. Bantuan internasional ini memainkan peran penting dalam mendukung proyek-proyek pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memperluas akses ke pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu fokus utama dari kerja sama ini adalah memastikan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pembelajaran. Dengan adanya ICT, diharapkan siswa dapat mengakses sumber belajar yang lebih luas dan lebih bervariasi. Pemerintah Mesir telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, seperti penyediaan perangkat digital bagi siswa dan guru. Selain itu, pengembangan platform pembelajaran daring juga menjadi prioritas dalam reformasi pendidikan Mesir. Dengan meningkatnya penetrasi internet di negara tersebut, peluang untuk mengembangkan pendidikan berbasis digital semakin besar. Implementasi teknologi dalam pendidikan juga memungkinkan adanya sistem evaluasi yang lebih objektif dan transparan. Pemerintah berupaya untuk menjadikan teknologi sebagai alat yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Pada tingkat pendidikan tinggi, integrasi ICT menjadi aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Perguruan tinggi di Mesir mulai mengadopsi metode pembelajaran berbasis teknologi guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Banyak universitas yang telah menerapkan sistem

pembelajaran daring serta menggunakan platform digital untuk mendukung proses akademik. Dengan adanya ICT, mahasiswa memiliki akses ke berbagai sumber belajar yang lebih luas, baik dalam bentuk buku elektronik, jurnal akademik, maupun materi pembelajaran interaktif. Selain itu, perguruan tinggi juga mulai menerapkan teknologi kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran guna meningkatkan efektivitas pengajaran. Pemerintah Mesir menyadari bahwa tanpa adopsi teknologi yang memadai, sistem pendidikan akan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, reformasi pendidikan tinggi di Mesir terus berfokus pada penguatan kapasitas digital dan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta dalam mengembangkan program-program pendidikan berbasis teknologi. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi di Mesir diharapkan dapat memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja global.

Reformasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir juga mencakup perbaikan dalam kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kurikulum yang lebih modern dan berbasis keterampilan telah mulai diterapkan di berbagai institusi pendidikan. Salah satu fokus utama reformasi ini adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis dan problem-solving bagi siswa dan mahasiswa. Selain itu, pendidikan vokasi dan kejuruan juga mulai mendapatkan perhatian lebih dalam sistem pendidikan Mesir. Pemerintah menyadari bahwa tidak semua lulusan sekolah menengah akan melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga pendidikan kejuruan menjadi alternatif yang penting. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, diharapkan lulusan dapat memiliki keterampilan yang langsung dapat digunakan dalam dunia kerja. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan kerja sama dengan industri dalam menyusun kurikulum pendidikan vokasi yang lebih relevan. Langkah-langkah ini diambil agar pendidikan di Mesir dapat lebih adaptif terhadap perubahan global dan kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, lulusan dari berbagai jenjang pendidikan dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

Upaya untuk meningkatkan sistem pendidikan di Mesir terus dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program reformasi yang komprehensif. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, Mesir berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, modern, dan berkualitas. Pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak besar pada pembangunan ekonomi dan sosial negara. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan guna memastikan bahwa setiap anak di Mesir mendapatkan akses pendidikan yang layak. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, komitmen yang kuat dari pemerintah dan dukungan dari organisasi internasional menjadikan pendidikan di Mesir terus berkembang. Dengan reformasi yang berkelanjutan, diharapkan sistem pendidikan Mesir dapat menjadi salah satu yang terbaik di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan alasan di atas, dilakukan Perbandingan pendidikan antara Mesir dan Indonesia. Perbandingan Pendidikan merupakan suatu kegiatan menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian maka studi perbandingan pendidikan ini adalah mengandung pegertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari sistem pendidikan, untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dari kedua hal tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif untuk membandingkan sistem pendidikan di Mesir dan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kesamaan dan perbedaan dalam struktur, kebijakan, serta tantangan yang dihadapi oleh kedua negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif komparatif yang membandingkan sistem pendidikan berdasarkan berbagai aspek seperti struktur pendidikan, kebijakan pemerataan akses, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi pendidikan di Mesir dan Indonesia untuk mendapatkan wawasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan di kedua negara. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur akademik, laporan kebijakan pendidikan dari kementerian terkait, serta data dari organisasi internasional seperti

UNESCO, World Bank, dan Human Development Index (HDI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi dokumentasi, wawancara semi-terstruktur, dan analisis data sekunder. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen resmi seperti kebijakan pendidikan nasional, laporan statistik pendidikan, serta artikel jurnal yang relevan. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pakar pendidikan dan pejabat kementerian pendidikan untuk mendapatkan perspektif lebih mendalam mengenai tantangan dan strategi peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan data dari berbagai organisasi internasional yang mengukur kualitas pendidikan, aksesibilitas, dan tingkat literasi di kedua negara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis komparatif. Proses analisis meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel atau deskripsi naratif untuk memudahkan perbandingan antara sistem pendidikan Mesir dan Indonesia. Akhirnya, kesimpulan ditarik berdasarkan identifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan antara kedua sistem pendidikan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat diambil dari hasil temuan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Pendidikan di Negara Mesir

Jenjang Pendidkan di Negara Mesir

Sistem pendidikan Mesir sangat sentralistik, dan dibagi menjadi tiga tahap:

a. Pendidikan Dasar (Arab: ·····i ا ~ا~ ا, transliterasi: al-Ta aleem al-ʿ Asassī) terdiri dari Tahap primer dan tahap persiapan. Untuk pendidikan dasar 4-14 tahun: TK selama dua tahun diikuti oleh sekolah dasar selama enam tahun dan sekolah persiapan selama tiga tahun.

b. Pendidikan Menengah (Arab: ·····i ا ىp:ا····· ا, transliterasi: al-Ta aleem al-ʿ Thanawī) . Sekolah menengah tahap selama tiga tahun, untuk usia 15-17.

c. Pasca Pendidikan Menengah (Arab: ·····i ا ا ا, transliterasi: al-Ta aleem ʿ al-ʿ Gamme ī)

1) Pendidikan Dasar

Pendidikan di Mesir wajib dilakukan selama 9 tahun akademik antara usia 6 dan 14. Selain itu, semua tingkat pendidikan bebas dalam menjalankan pemerintahan sekolah. Menurut Bank Dunia, terdapat perbedaan besar dalam pencapaian pendidikan yang kaya dan yang miskin, yang biasa dikenal sebagai "kesenjangan kekayaan." Meskipun rata-rata tahun sekolah diisi oleh orang kaya dan miskin hanya satu atau dua tahun, tetapi kesenjangan kekayaan mencapai setinggi sembilan atau sepuluh tahun.

Pada tahun 1999-2000 angka partisipasi total pra-siswa SD adalah 16 persen dan meningkat menjadi 24 persen pada tahun 2009. Terlepas dari swasta atau negara dijalankan, semua lembaga prasekolah berada di bawah Departemen Pendidikan.Adapun tugas Departemen yaitu untuk memilih dan mendistribusikan buku pelajaran. Menurut Departemen pendidikan, pedoman ukuran maksimum prasekolah tidak boleh melebihi dari 45 siswa. Departemen Pendidikan juga mendapat dukungan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia untuk meningkatkan sistem pendidikan anak usia dini dengan meningkatkan akses ke sekolah-sekolah, peningkatan kualitas pendidikan dan membangun kapasitas para guru. Lapis kedua wajib pendidikan dasar adalah tahap persiapan menengah pertama atau tiga tahun yang lama. Pentingnya menyelesaikan tingkat pendidikan ini adalah untuk menjaga siswa terhadap buta huruf sebagai awal drop out pada tahap ini mudah surut ke buta huruf dan akhirnya kemiskinan.

2). Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah terdiri dari tiga lintasan: umum, kejuruan / teknis dan dualsystem. Pendidikan kejuruan yang mewakili sekolah Kohl i Mubarak. Tahap sekunder umum mencakup 3 tahun pendidikan, sedangkan menengah kejuruan lagu bisa selama 3-5 tahun dan 3 tahun untuk sistem ganda masukkan pendidikan ke kejuruan tingkat menengah, para siswa harus lulus ujian nasional yang diberikan padaakhir tahap sekunder. Pada tahun 2004, 77,3 persen siswa yang menyelesaikan tahap persiapan diperkirakan akan didaftarkan dalam tingkat sekunder pendidikan ini, mahasiswa memiliki penilaian formatif dan sumatif selama tahun pertama dan rata- rata akhir tahun ujian standar nasional untuk tahun kedua dan tiga kualifikasi para siswa untuk mengambil Sertifikat Pendidikan Menengah

Umum-Thanawiya Amma, yang merupakan salah satu persyaratan untuk masuk ke universitas.

3). Pendidikan Tinggi

Sistem Pendidikan Tinggi Mesir memiliki sistem pendidikan tinggi yang sangat luas. Sekitar 30% dari semua orang Mesir dalam kelompok usia yang relevan pergi ke universitas Menurut The Economist, standar pendidikan di universitas publik Mesir "bukan main". Departemen Pendidikan Tinggi mengawasi tingkat pendidikan tersier. Dalam sistem pendidikan saat ini, ada 17 universitas umum, 51 publik lembaga non-universitas, 16 perguruan tinggi swasta dan 89 perguruan tinggi swasta. Dari 51 lembaga non-universitas, 47 tahun dua-tengah lembaga teknis (MTIs) dan empat adalah 4-5 tahun lembaga teknis yang lebih tinggi]. Kohort pendidikan tinggi diperkirakan akan meningkat mendekati 6 persen (60,000) siswa per tahun khususnyatahun 2009 .

2. Jenis-jenis Pendidikan di Negara Mesir

a. Sistem pendidikan Formal

Sistem pendidikan Mesir mempunyai dua struktur parallel:Struktur sekuler dan struktur keagamaan Al Azhar. Struktur sekuler diatur oleh kementerian Pendidikan. Struktur Al Azhar dilaksanakan oleh kementerian urusan al azhar, ini sering juga disebut Kementerian agama di negara-negara lain. Selain dari kedua struktur ini, ada pula jenis sekolah yang diikuti oleh sejumlah kecil anak-anak. Misalnya, anak-anak cacat masuk ke sekolah-sekolah khusus; bagi yang ingin

menjadi militer masuk ke sekolah militer, dan ada pula generasi muda yang meninggalkan sekolahnya dan mendaftar pada program-program nonformal yang diselenggarakan oleh berbagai badan atau lembaga.

Diagram di bawah ini menunjukkan kedua struktur pendidikan formal Mesir.

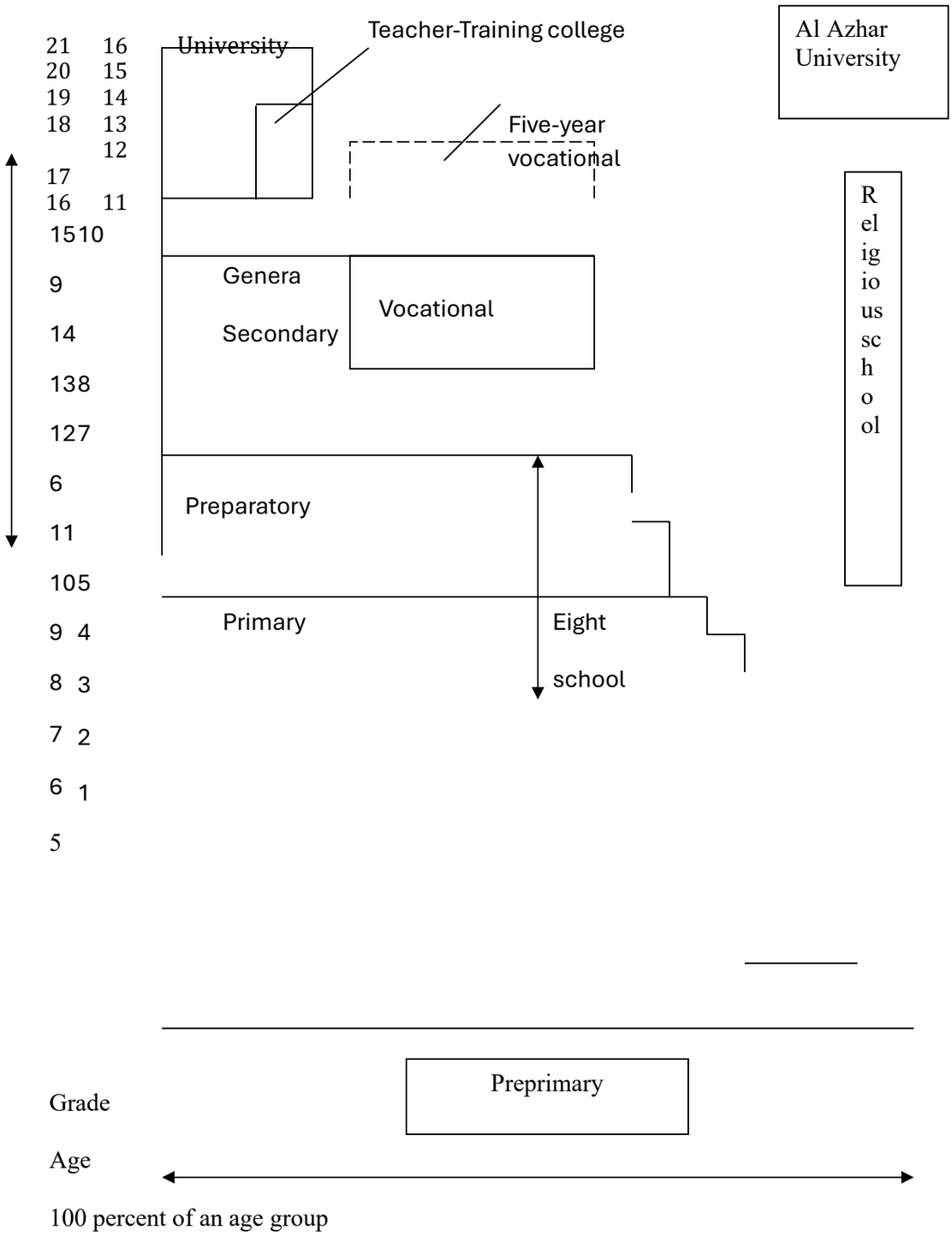

1). Sistem Sekolah Sekuler

Pendidikan wajib di Mesir berlaku sampai Grade 8 dan ini dikenal sebagai pendidikan dasar. Ada pendidikan taman kanak-kanak dan play group yang mendahului pendidikan dasar, tetapi jumlahnya sangat kecil dan kebanyakan berada di kota-kota. Pendidikan dasar ini dibagi menjadi dua jenjang. Jenjang pertama yang dikenal dengan Sekolah Dasar mulai dari Grade 1 sampai Grade 5, dan jenjang kedua, yang dikenal dengan sekolah persiapan, mulai dari grade 6 sampai Grade 8. Sekolah

persiapan ini baru menjadi pendidikan wajib dalam tahun 1984, sehingga nama "sekolah persiapan" tidak tepat lagi.

Setelah mengikuti pendidikan dasar selama delapan tahun, murid-murid punya empat pilihan:Tidak bersekolah lagi, memasuki sekolah menengah umum, memasuki sekolah teknik menengah tiga tahun, atau memasuki sekolah teknik lima tahun. Pada sekolah menengah umum, tahun pertama (Grade 9) adalah kelas bersama. Pada grade 10 murid harus memilih antara bidang sains dan nonsains (IPA vs Non-IPA) untuk Grade 10 dan 11.

Pendidikan tinggi di universitas dan institusi spesialisasi lainnya mengikuti pendidikan akademik umum. Pendidikan pada sebagian lembaga perguruan tinggi berlangsung selama dua, empat atau lima tahun tergantung pada bidang dan program yang dipilih. Semenjak tahun 199, Sebagian tamatan sekolah teknik dibolehkan melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Pertambahan penduduk yang begitu cepat di Republik Arab Mesir, berdampak meningkatnya tuntutan atas pendidikan, dan seterusnya, meningkat pula jumlah murid. Peningkatan jumlah murid ini sebagai pengaruh dari kenyataan bahwa semenjak revolusi tahun 1952, Mesir selalu berjuang memperluas pendidikan sebagai salah satu prasyarat untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

2). Sistem Sekolah Al-Azhar

Sistem sekolah Al Azhar hampir sama dengan sistem sekolah sekuler pada tingkat pendidikan dasar. Perbedaannya ialah bahwa pendidikan agama islam lebih mendapat tekanan. Tetapi untuk mata pelajaran kurikulumnya seperti pada sekolah sistem sekuler. Grade 10 dan 11 sama untuk semua murid. Pada akhir grade 11, murid boleh memilih apakah ingin masuk ke sekolah umum dua tahun lagi, atau masuk ke sekolah agama selama dua tahun. Pada level universitas, fakultas- fakultasnya sama dengan yang ada pada pendidikan sekuler tetapi kurikulumnya lebih menekankan pada keagamaan. Selanjutnya, seluruh pendidikan guru untuk pendidikan keagamaan hanya diselenggarakan dalam lingkungan sistem Al Azhar. Sekolah-sekolah Al Azhar lebih sedikit muridnya dibandingkan dengan jumlah muridsekolah sistem sekuler. Namun pada kenyataannya lebih besar jumlah tamatan dari jalur Al Azhar yang masuk ke pendidikan tinggi dibandingkan dengan tamatan sekolah sistem sekuler. Perlu dicatat juga bahwa tidak ada pendidikan teknik pada sistem Al Azhar.

3). Pendidikan Vokasional dan Teknik

Upaya untuk memperluas pendidikan kejuruan (vokasional) dan pendidikan teknik dimulai tahun 1950-an. Jumlah sekolah vokasional dan teknik meningkat dari 134 (dengan 31.800 siswa) dalam tahun 1952 menjadi 460 buah (dengan siswa 115.600) dalam tahun 1960.

b. Pendidikan nonformal

Pendidikan non formal didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pendidikan terencana di luar sistem pendidikan formal. Pendidikan ini dmaksudkan untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang tertentu. Apakah itu anak-anak, generasi muda atau orang dewasa;apakah mereka laki-laki atau perempuan, petani, pedagang, atau pengrajin;apakah mereka dari orang kay atau miskin. Di mesir, pendidikan nonformal terutama dikaitkan dengan penghapusan iliterasi. Dengan demikian, kebanyakan program lebih dikonsentrasikan pada pendidikan nonformal dalam aspek itu.

Semenjak tahun 1967, Kementerian pemburuhan menyelenggarakan program penataran untuk mendidik orang-orang yang telah menamatkan pendidikan tingkat dasar, dan orang-orang yang putus sekolah formal yang berusia antara 12 dan 18 tahun. Mereka dilatih dalam keterampilan vokasional yang cocok untuk lingkungan dan kemampuannya. Pendidikan ini biasanya diselenggarakan selama sembilan bulan:tujuh bulan di pusat-pusat latihan vokasional, dan dua bulan di tempat-tempat unit produksi. Para peserta latihan kemudian ditempatkan bekerja pada sektor pemerintah atau sektor swasta.

Di bawah pengawasan Kementerian Perindustrian, ada 33 buah pusat pelatihan di berbagai governorat. Pusat-pusat pelatihan ini menyelenggarakan program-program kilat bagi pekerja yang masih "semiskilled" melalui pemagangan di industri-industri, dan juga meningkatkan keterampilan para teknisi. Program bagi orang yang semiskilled ini diikuti peserta yang berusia sekitar 17 tahun dengan lama program enam bulan. Program pemagangan dapat pula diikuti oleh murid-murid yang telah tamat pendidikan dasar, atau mereka yang tidak akan melanjutkan

DIALEKTIKA PUBLIK
| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |
Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

pendidikannya ke sekolah teknik. Program pemagangan ini berlangsung selama tiga tahun. Untuk meningkatkan keterampilan karyawan, perusahaan memilih karyawan yang telah punya pengalaman kerja minimal lima tahun untuk mengikuti pelatihan teknis malam hari selama tiga bulan.

3. Jenis-jenis Sekolah:

Secara umum, ada dua jenis sekolah pemerintah yaitu Sekolah Arab dan Eksperimental Language Schools.

a. Sekolah Arab,

Pemerintah menyediakan kurikulum nasional dalam Bahasa Arab. Sebuah kurikulum pemerintah bahasa Inggris diajarkan mulai pada tahun keempat Primer dan Perancis ditambahkan sebagai bahasa asing kedua di Pendidikan Menengah.

b. Eksperimental Language Schools, mengajar sebagian besar kurikulum pemerintah (Sains, Matematika dan Komputer) dalam bahasa Inggris, dan menambahkan Perancis sebagai bahasa asing kedua di Persiapan Pendidikan. Advanced kurikulum bahasa Inggris disediakan dalam semua tahap pendidikan. Pelajaran sosial diajarkan dalam bahasa Arab. Siswa diterima ke dalam kelas pertama pada umur tujuh; satu tahun lebih tua dari sekolah-sekolah Arab.

Secara umum, terdapat empat jenis sekolah swasta:

1). Sekolah Ordinary, kurikulum mereka sangat mirip dengan sekolah-sekolah pemerintah, tetapi sekolah-sekolah swasta lebih memperhatikan siswa kebutuhan pribadi dan fasilitas sekolah.

2. Sekolah Bahasa, sebagian besar mengajarkan kurikulum pemerintah dalam bahasa Inggris, dan menambahkan Perancis atau Jerman sebagai bahasa asing keduaMereka diharapkan menjadi lebih baik daripada sekolah-sekolah lain, karena fasilitas yang tersedia, namun biaya mereka jauh lebih tinggi. Beberapa sekolah tersebut menggunakan bahasa Perancis atau Jerman sebagai bahasa pengantar utama, tetapi mungkin sulit bagi siswa untuk belajar di universitas pemerintah dalam bahasa Arab atau Inggris sesudahnya.

3. Sekolah Agama, adalah sekolah yang berorientasi religius sebagai sekolah Azhar.

4. Sekolah Internasional, adalah sekolah swasta yang mengikuti kurikulum negara lain, seperti Inggris, Amerika, atau sistem Perancis, dan gelar yang diterima dari mereka mendapatkan sertifikasi resmi dari Departemen Pendidikan, untuk dapat memenuhi syarat untuk mendaftar ke universitas-universitas Mesir, seperti sekolah menawarkan bahkan lebih baik daripada fasilitas & kegiatan regulersekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi, tapi dikritik akan menyediakan tingkat pendidikan jauh lebih mudah dibandingkan dengan kurikulum umum, dan beberapa universitas Mesir memerlukan nilai lebih tinggi daripada siswa sekolah reguler sebagai minimum untuk pendaftaran, atau ekstra ijazah sekolah tinggi seperti SAT. Banyak sekolah swasta yang dibangun oleh misionaris, saat ini berafiliasi dengan gereja-gereja dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Banyak sekolah swasta yang menawarkan program pendidikan tambahan, bersama dengan kurikulum nasional, seperti Amerika High School Diploma, sistem IGCSE Inggris, Perancis baccalauréat, Abitur Jerman dan International Baccalaureate. Ini adalah jenis sekolah swasta di Mesir. Ini adalah jenis sekolah swasta di Mesir.

Jenjang Pendidikan Di Indonesia

DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

Dalam usaha pemerataan pendidikan di Indonesia, usia wajib belajar di Indonesia dimulai sejak 6 hingga 15 tahun (wajib belajar 9 tahun) dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan. Angka melek huruf Indonesia adalah sebesar 87,9% atau menduduki peringkat 95 dari 179 negara yang disurvei (Wikipedia, 2010).

Menurut pasal 14 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggaraan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal, dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. (pasal 28, UU SISDIKNas, 2003)

.

Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain,Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat (pasal 28, UU SISDIKNAS, 2003). Pendidikan ini sebagai upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan ini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini (Wikipedia, 2010).

b) Pendidikan Dasar

Menurut pasal 17 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah (UU SISDIKNAS, 2003).

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pada pendidikan dasar ini pada umumnyan terbagi menjadi Sekolah Dasar (6-12 tahun) dan Sekolah Menengah Pertama (13-15 tahun). Pada pendidikan dasar diberikan mata pelajaran yang merupakan dasar bagi pendidikan tingkat lanjutan di tingkat menengahatas.

Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pada masa ini para siswa mempelajari bidang-bidang studi antara lain: Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Seni, Pendidikan Olahraga, dan lain-lain.

Di akhir masa pendidikan di SD, para siswa harus mengikuti dan lulus dari Ujian Nasional (UN) untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke SMP dengan lama pendidikan 3 tahun. Pada akhir pendidikan di Sekolah Menengah

DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

Pertama juga diadakan ujian untuk menyelesaikan pendidikan 3 tahun.

3) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar (pasal 18, UU SISDIKNAS 2003), dengan umur berkisar 16-18tahun.

Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kjuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Lama pendidikan menengah atas ini adalah 3 tahun.

Setiap jenjang terdapat ujian yang diselenggarakan oleh negara dibawa Kementerian Pendidikan Nasional. Ujian tersebut dilaksanakan pada akhir pendidikan disetiap jenjang yang bertujuan sebagai syarat untuk yang melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi (ke akademi atau perguruan tinggi).

Di Indonesia, pada Sekolah Menengah Atas, jurusan yang ada adalah jurusan Ilmu Alam, Ilmu Sosial, dan Bahasa, sedangkan di Sekolah Menengah Kejuruan banyak jurusannya. Pada Sekolah Menengah Kejuruan, dilakukan pemisahan sesuai bidangnya. Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Otomotif, Kimia, Teknik Komputer, Elektronika, Gambar, Bangunan, Listrik, Bengkel, Kayu, Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Manajemen, Tata Boga, Tata Busana, Tata Laksana, Kecantikan, Agribisnis, Holtikultura, Perikanan, Kesenian, Musik, dan sebagainya (Kunandar, 2009).

Kenaikan kelas pada tingkat sekolah menengah dilaksanakan pada tiap akhir tahun ajaran. Pada akhir jenjang tingkat menengah, terdapat ujian nasional yang diselenggarakan oleh negara dibawah Kementerian Pendidikan Nasional. Ujian tersebut juga dilaksanakan pada akhir pendidikan disetiap jenjang yang bertujuan sebagai syarat untuk yang melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi.

Tetapi ujian akhir pada tingkat menengah ini belum bisa dijadikan dasar untuk masuk perguruan tinggi (Kunandar, 2009).

Selain jenjang pendidikan di atas, di Indonesia terdapat juga pendidikan lain sebagai berikut.

Pendidikan Vokasi

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentumaksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1).

Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama (pasal 30, UU SISDIKNAS 2003).

Pendidikan Kedinasan

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga nondepartemen(pasal 29, UU SISDIKNAS 2003). Pendidikan ini berfungsi meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga nondepartemen.

Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (pasal 31, UU

DIALEKTIKA PUBLIK
| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |
Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

SISDIKNAS, 2003). Pendidikan ini berfungsi memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk Sekolah Luar Biasa/SLB) (pasal 32, UU SISDIKNAS, 2003). Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Perbandingan Pendidikan di Mesir dan Indonesia

Jenjang pendidikan di Mesir dan di Indonesia berdasarkan perkembangan usia adalah sama. Perbedaan terdapat pada penekanan pendidikan dasar, di Indonesia 9 tahun meliputi SD dan SMP, sedangkan di Mesir 8 tahun yaitu pada Primary School.

Perbandingan jenjang pendidikan di Mesir dan di Indonesia

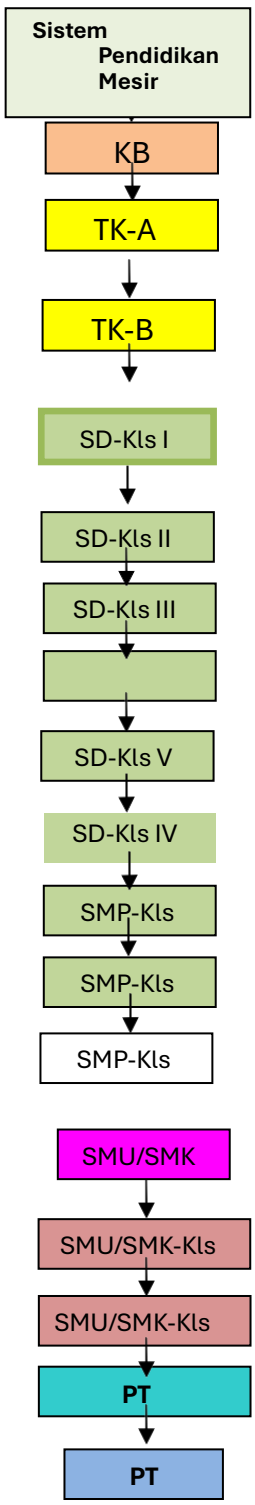

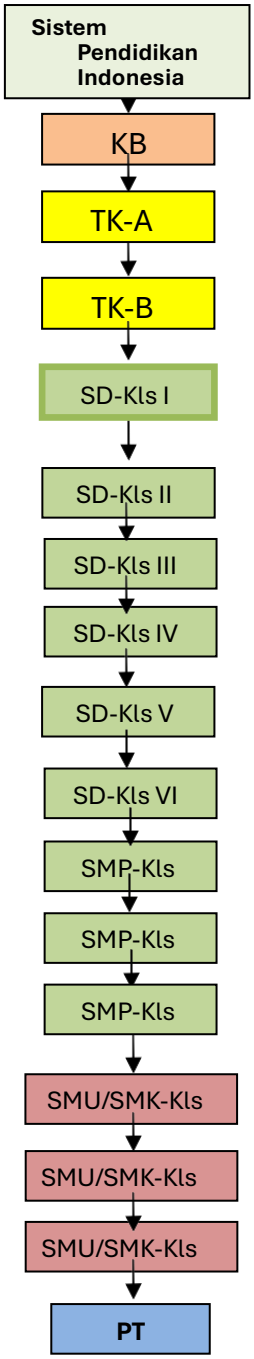

DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulannya, sistem pendidikan di Mesir sangat sentralistik dan terbagi menjadi tiga tahap utama, yaitu Pendidikan Dasar yang mencakup tahap primer dan persiapan, Pendidikan Menengah, serta Pasca Pendidikan Menengah. Jenis pendidikan di Mesir terdiri dari pendidikan formal yang meliputi sistem pendidikan sekuler, sistem pendidikan Al-Azhar, dan sistem pendidikan vokasional, serta pendidikan nonformal. Sementara itu, jenjang pendidikan di Mesir dan Indonesia memiliki kesamaan dalam hal perkembangan usia peserta didik, namun terdapat perbedaan dalam struktur pendidikan dasarnya. Di Indonesia, pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan di Mesir hanya berlangsung selama 8 tahun dalam jenjang Primary School. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan di kedua negara, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dalam mengadaptasi sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi. Indonesia dapat belajar dari Mesir dalam hal integrasi pendidikan keagamaan dengan pendidikan umum, sementara Mesir dapat mengadopsi sistem pendidikan dasar yang lebih lama seperti di Indonesia untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah kedua negara juga perlu meningkatkan kerja sama internasional untuk memperbaiki kurikulum, sarana pendidikan, serta kualitas tenaga pendidik guna menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.

Referensi

Abdurrahman, M. (2019). *Pendidikan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ahmad, A. (2020). "Vocational Education in Indonesia and Egypt: A Comparative Analysis." *Proceedings of the International Conference on Education and Development Studies*.

Ahmad, D. (2020). *Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aisyah, S. (2018). "Reformasi Kurikulum Pendidikan Dasar di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 125–140.

Al-Sharif, B. (2020). "Education System in Egypt: Challenges and Prospects." *International Journal of Educational Development*, 35(4), 455–472.

Amini, R. (2018). "Educational Development in Indonesia: Policies and Challenges." *Journal of Education Policy*, 12(3), 215–229.

Arifin, Z. (2021). *Evaluasi Pendidikan: Prinsip, Teknik, dan Prosedur*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Asmani, J. M. (2019). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris*. Jakarta: Bumi Aksara.

Aziz, R. (2018). "Policy Implementation of Islamic Education in Egypt and Indonesia." *Proceedings of the Islamic Education Summit 2018*.

Azra, A. (2018). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

Baharuddin, A. (2020). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Basuki, W. (2019). *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Kolonial Hingga Reformasi*. Bandung: Alfabeta.

Benavot, A., & Tanner, E. (2017). "The Expansion of Primary Education in the Arab World: Trends and Challenges." *Comparative Education Review*, 61(2), 223–245.

Bray, M. (2020). *Shadow Education: Private Tutoring and Its Policy Implications*. UNESCO.

Bray, M., Adamson, B., & Mason, M. (2007). *Comparative Education Research: Approaches and Methods*. Springer.

Brooks, C. (2019). "Access to Quality Education in Developing Countries: A Case Study of Egypt and Indonesia." *International Education Policy Conference Proceedings*.

Budiman, M. (2019). *Komparasi Sistem Pendidikan di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN*. Malang: UMM Press.

Burhanuddin, J. (2019). "Pendidikan Keagamaan di Indonesia: Evaluasi dan Prospek." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 12(1), 54–67.

Carnoy, M. (2019). *The State and Schooling in the Global South: Understanding the Failure and Success of Education Systems*. Routledge.

Cheng, K. M., & Tan, J. (2010). *Educational Reforms in Southeast Asia: Challenges and Prospects*. Springer.

Collins, R. (2018). "Education and Development: Theories and Policies." *Journal of International Education Research*, 6(1), 45–67.

Cummings, W. K., & Altbach, P. G. (1997). *The Challenge of Eastern Asian Education: Implications for America*. State University of New York Press.

Darling-Hammond, L. (2017). "Educational Equity and Quality in Global Perspective." *Harvard Educational Review*, 87(1), 1–15.

Darmaningtyas. (2018). *Pendidikan Rusak-Rusakan: Kritik Sistem Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.

Davies, P. (2019). "Comparative Analysis of National Education Policies." *International Journal of Comparative Education*, 42(3), 145–167.

Dedi, I. (2021). *Manajemen Pendidikan Nasional di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.

Djamari, S. (2018). *Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Gramedia.

Egyptian Ministry of Education. (2019). *Education Development Strategy: 2030 Vision*.

Fauzan, A. (2020). "Transformasi Pendidikan di Indonesia Pasca-Reformasi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(3), 112–130.

Fiske, E. B. (2012). *World Education Indicators: Education Policy Analysis*. UNESCO Publishing.

Gunawan, R. (2021). *Pendidikan Multikultural di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

DIALEKTIKA PUBLIK

| ISSN (Print) 2528-3332 | ISSN (Online) 2621-2218 |

Jurnal dapat diakses di http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik

Hamalik, O. (2019). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2012). "The Role of Education Quality in Economic Growth." *World Bank Research Observer*, 27(2), 227–248.

Harber, C. (2018). *Education and International Development: Theory, Practice, and Issues*. Routledge.

Himpunan Perundang-Undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003. Kunandar, 2009. Guru Profesional. Rajawali Pers, Yogyakarta.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Egypt)

Hasan, S. H. (2018). *Sejarah Pendidikan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Heyneman, S. P. (2018). "The Role of Government in Education Reform: A Comparative Study." *International Journal of Educational Research*, 49(1), 45–60.

Hidayat, R. (2019). *Komparasi Pendidikan di Indonesia dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Egypt

http://www.mapsofworld.com/egypt/education/

http://countrystudies.us/egypt/71.htm

Human Development Index (HDI). (2021). *Human Development Report 2021/2022*. United Nations Development Programme.

Husaini, A. (2020). *Pendidikan Islam dan Tantangan Modernitas*. Jakarta: Gema Insani.

Idris, A. (2021). "Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Kebijakan Publik." *Jurnal Pendidikan Nasional*, 7(1), 45–60.

Indonesian Ministry of Education and Culture. (2020). *Education Statistics of Indonesia 2020*.

Jalal, F., & Musthafa, B. (2018). *Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Pelajar.

Kamaluddin, A. (2020). *Pendidikan Vokasional di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kamel, S. (2019). "Higher Education Reforms in Egypt: Challenges and Opportunities." *Middle Eastern Studies Journal*, 43(1), 77–95.

Komariah, A. (2020). "Education Policy in Indonesia: Analysis of the 9-Year Compulsory Education Program." *Indonesian Journal of Educational Research*, 15(3), 134–150.

Kurniawan, D. (2019). *Pendidikan Berbasis Karakter di Indonesia*. Malang: UMM Press.

Lee, W. O. (2018). "Comparing Vocational Education Policies in Asia: Lessons from Indonesia and Egypt." *Journal of Comparative Education*, 55(2), 88–104.

Liddell, H. (2021). *The Future of Higher Education in the Middle East: Challenges and Opportunities*. Cambridge University Press.

Marginson, S. (2016). *Higher Education and the Common Good*. Melbourne University Press.

Maulana, Y. (2021). *The Role of Education*

in Socioeconomic Development: A Case Study of Egypt and Indonesia. (Doctoral dissertation, University of Indonesia).

Mulyasa, E. (2021). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasir, M. (2020). "Analisis Sistem Pendidikan di Indonesia: Problematika dan Solusinya." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 8(4), 220–234.

Nasution, S. (2018). *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Navarro, J. (2020). "Educational Reforms in Developing Nations." *Policy and Practice in Education*, 24(2), 79–95.

Nuh, M. (2019). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Antara Harapan dan Realitas*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

OECD. (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*.

Postlethwaite, T. N. (1995). *International Encyclopedia of National Systems of Education*. Pergamon Press.

Pritchett, L. (2013). *The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning*. Brookings Institution Press.

Psacharopoulos, G. (2009). *The Economics of Education: Human Capital, Family Background and Inequality*. Edward Elgar Publishing.

Purwanto, M. N. (2018). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahman, T. (2019). *Pendidikan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Filosofis dan Historis*. Yogyakarta: Deepublish.

Rasyid, H. (2020). *Politik Pendidikan Nasional: Dari Orde Lama Hingga Reformasi*. Bandung: Alfabeta.

Ridwan, A. (2021). *Kebijakan Pendidikan di Era Digital*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). *Globalizing Education Policy*. Routledge.

Rofiq, A. (2018). "Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Mesir dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 175–190.

Sahlberg, P. (2015). *Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?*. Teachers College Press.

Schultz, T. W. (2017). *Investment in Human Capital: The Role of Education and Research*. Harvard University Press.

Setiawan, R. (2019). *Technology Integration in Higher Education: A Comparative Study of Indonesia and Egypt*. (Master's thesis, Cairo University).

Smith, P. (2019). "The Globalization of Education: Impact on National Policies." *Comparative Education Review*, 52(4), 403–421.

Suwardi, W. (2020). "Pendidikan Nonformal di Indonesia: Tantangan dan Prospeknya." *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 6(1), 33–50.

Suyanto, S. (2019). *Kebijakan dan Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta:

Universitas Negeri Yogyakarta Press.

Syah Nur, Agustiar. 2001. Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara. Penerbit Lubuk Agung. Bandung.

Syamsuddin, A. (2021). *Pendidikan Islam di Indonesia: Perspektif Historis dan Konseptual*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Tilaar, H. A. R. (2019). "Education Reform in Indonesia: Between Policy and Reality." *Educational Review Journal*, 17(3), 102–118.

Tilaar, H. A. R. (2019). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia.

Triyono, M. (2020). *Reformasi Pendidikan di Indonesia: Kritik dan Solusi*. Yogyakarta: Deepublish.

Ubaidillah, A. (2019). *Pendidikan dan Multikulturalisme di Indonesia*. Malang: UMM Press.

UNESCO. (2017). *Education in Indonesia: Progress and Challenges*.

UNESCO. (2019). *Education for Sustainable Development: Policies and Practices in the Middle East and Asia*.

UNESCO. (2021). *Global Education Monitoring Report 2021: Inclusion and Education*. UNESCO Publishing.

Verger, A., Fontdevila, C., & Zancajo, A. (2016). *The Privatization of Education: A Political Economy Perspective*. Teachers College Press.

Wahid, A. (2020). *Pesantren dan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Wibowo, S. (2019). "Tantangan Pendidikan Dasar di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 88–105.

Widodo, H. (2021). *Pendidikan Karakter di Sekolah: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2018). *Politik Pendidikan di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

World Bank. (2018). *Learning to Realize Education's Promise: World Development Report 2018*.

World Bank. (2020). *Education Reform in Egypt: A Policy Review*.

World Economic Forum. (2020). *The Future of Jobs Report 2020: The Impact of Education and Training*.

Yamin, M. (2020). *Pendidikan di Indonesia: Problematika dan Solusinya*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, S. (2021). "Sistem Pendidikan Nasional: Perbandingan Indonesia dan Negara-Negara Lain." *Jurnal Pendidikan Global*, 10(3), 112–130. 105-110. Artikel dari berbagai jurnal nasional seperti *Jurnal Pendidikan Islam*, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, *Jurnal Pendidikan Nasional*, serta laporan dari *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia*.